

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah telah ditetapkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Apabila pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan baik sesuai peraturan pemerintah yang telah ditetapkan, tentunya akan meningkatkan kinerja keuangan daerah itu sendiri.

Menurut Julitawati dkk (2012) menyatakan bahwa pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah adalah semua penerimaan kas yang menjadi hak daerah dan diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan Asli Daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah. Karena itu, kemampuan suatu daerah menggali PAD akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan daerah tersebut. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat diukur berdasarkan jumlah dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Penge

lolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah. Semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD, maka akan semakin kecil pula ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat. Sumber keuangan yang berasal dari PAD lebih penting dibanding dengan sumber yang berasal dari luar PAD. Hal ini karena PAD dapat dipergunakan sesuai dengan kehendak dan inisiatif pemerintah daerah demi kelancaran penyelenggaraan urusan daerahnya. Selain PAD, dana perimbangan juga merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang memiliki kontribusi besar terhadap struktur APBD.

Azis dkk (2014) menyatakan bahwa dana perimbangan dapat diharapkan untuk terjadinya peningkatan pelayanan diberbagai sektor terutama sektor publik. Peningkatan layanan publik ini diharapkan dapat meningkatkan daya tarik bagi investor untuk membuka usaha di daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dana perimbangan didefinisikan sebagai dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri atas Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus. Dana Perimbangan dapat diukur berdasarkan jumlah dari Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.

Salah satu alat analisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya. Rasio belanja

modal terhadap total belanja daerah mencerminkan porsi belanja daerah yang dibelanjakan untuk belanja modal. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah (Mardiasmo, 2009). Belanja Modal dapat diukur berdasarkan jumlah dari Belanja Modal Tanah; Belanja Modal Peralatan dan Mesin; Belanja Modal Gedung dan Bangunan; Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Belanja Modal Lainnya; dan Belanja Modal Badan Layanan Umum. Sedangkan Belanja Modal sendiri ditambah belanja barang dan jasa, merupakan belanja pemerintah yang diharapkan memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah selain dari sektor swasta, rumah tangga, dan luar negeri. Hidayat (2013) menyatakan bahwa semakin tinggi angka rasionya semakin baik pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, semakin rendah angkanya maka semakin buruk pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi.

Menurut Halim (Andirfa, 2016) salah satu instrument untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap anggaran pendapatan dan belanja yang telah ditetapkan dan disahkan. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah tingkat capaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi anggaran dan realisasi anggaran dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-

undangan selama periode anggaran. Pengukuran Kinerja Keuangan dapat diukur berdasarkan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dengan rumus Pendapatan Asli Daerah dibagi Pendapatan Transfer di kali 100%. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menggambarkan sejauh mana ketergantungan daerah terhadap sumber dan ekstern. Semakin tinggi rasio ini berarti tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern semakin rendah demikian pula sebaliknya. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah pada tahun 2013 memiliki nilai rata-rata rasio sebesar 16%, tahun 2014 memiliki nilai rata-rata rasio sebesar 20% dan pada tahun 2015 memiliki nilai rata-rata sebesar 22%. Hal ini menggambarkan bahwa masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah terutama dalam membayar pajak dan retribusi daerah. Hal menunjukkan bahwa begitu besarnya peran pajak dan retribusi daerah dalam pembangunan baik pusat maupun daerah. Tujuan kinerja keuangan pemerintah untuk prestasi pelaksanaan program yang dapat diukur akan mendorong pencapaian prestasi tersebut. Pengukuran prestasi yang dilakukan secara berkelanjutan memberikan umpan balik untuk upaya perbaikan secara terus menerus dan pencapaian tujuan di masa mendatang.

Hal yang paling utama yang mencirikan bahwa suatu daerah merupakan daerah otonomi terletak pada kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber keuangan sendiri, sedangkan ketergantungan pada Pemerintah Pusat diusahakan seminimal mungkin. Kondisi tersebut

diharapkan dapat menjadikan Kabupaten dan Kota di Wilayah Provinsi Jawa Timur sebagai daerah yang memiliki perekonomian yang baik. Kinerja Provinsi Jawa Timur selama 2012-2014 cenderung mengalami peningkatan. Rata-rata pertumbuhan ekonomi selama periode tersebut sebesar 6,3 persen lebih tinggi dari laju pertumbuhan ekonomi rata-rata nasional sebesar 5,9 persen. Hal tersebut disebabkan karena Provinsi Jawa Timur memiliki posisi strategis di bidang industri karena terletak di antara Jawa Tengah dan Bali sehingga menjadi pusat pertumbuhan industri dan perdagangan (www.jatimprov.go.id diakses pada Juli 2018). Dengan potensi yang dimiliki Provinsi Jawa Timur diharapkan mampu membiayai segala kebutuhan daerahnya sendiri agar tercapai kemandirian sebagai tujuan dari adanya otonomi daerah.

Julitawati dkk (2012) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah. Setiap kenaikan PAD akan diikuti oleh peningkatan kinerja keuangan pemerintah. Andirfa (2016) menyatakan bahwa Belanja Modal, Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Pemerintah daerah kabupaten dan kota diharapkan agar dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan tujuan agar dapat membiayai belanja daerahnya sendiri sehingga mengurangi transfer Dana Perimbangan dari pemerintah pusat sebagai wujud kemandirian daerah dalam membiayai belanjanya. Kemampuan untuk memenuhi belanja daerah membuktikan bahwa pemerintah daerah telah

melakukan efisiensi terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota itu sendiri. Menurut Azis dkk (2014) PAD, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal berpengaruh secara simultan terhadap kinerja keuangan. Semakin besar tingkat belanja modal sektor penerimaan akan meningkatkan pendapatan asli daerah dan akan mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah berdasarkan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal dalam Kinerja Keuangan Pemerintah. Hasil dari penelitian ini yaitu dengan adanya Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal akan menghasilkan kinerja keuangan sebagai tolak ukur untuk peningkatan kinerja khususnya keuangan pemerintah daerah pada periode berikutnya.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Pradana (2016), dengan waktu, obyek, dan variabel yang berbeda karena ada penambahan variabel lain yaitu Belanja Modal yang dapat digunakan sebagai tolak ukur dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah. Objek dalam penelitian ini seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan latar belakang, maka peneliti mengungkap penelitian ini untuk dikaji lebih lanjut tentang **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013-2015”**.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013-2015?
2. Bagaimana Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013-2015?
3. Bagaimana Belanja Modal berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013-2015?
4. Bagaimana Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013-2015?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten dan Kota di Wilayah Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013-2015.

2. Untuk mengetahui pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013-2015.
3. Untuk mengetahui pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013-2015.
4. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013-2015.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi suatu manfaat baik bagi peneliti sendiri maupun bagi pihak-pihak yang terkait.

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain :

1. Bagi Universitas

Dengan penelitian ini diharapkan bisa menambah referensi ilmu pengetahuan di bidang ekonomi yang berkaitan dengan Kinerja Keuangan Pemerintah.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengaruh keberhasilan penerapan dalam kinerja keuangan daerah, menghasilkan informasi yang bermanfaat sebagai masukan dan

pertimbangan bagi pemerintah untuk mengetahui arti pentingnya kinerja keuangan pemerintah.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan aplikasi teori yang selama ini diperoleh dalam perkuliahan dan agar dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah.

4. Bagi Peneliti yang Akan Datang.

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi dan referensi bagi pihak- pihak peneliti, dan bisa menyempurnakan untuk peneliti berikutnya.

